

Latar Belakang

Dewasa ini, tuntutan adanya sistem tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*) semakin meningkat. Penyebab timbulnya konsep *good corporate governance* sendiri menurut Pandji (2008:130) adalah adanya dorongan dalam memberantas praktik *bad governance* (pemerintah yang tidak akuntabel, tidak transparan, penyalahgunaan wewenang, korupsi, dan lain-lain). Selain dikarenakan adanya praktik *bad governance*, berkembangnya isu mengenai corporate governance ini juga disebabkan oleh terjadinya pemisahan antara kepemilikan dengan pengendalian perusahaan (Dini,2010).

Penyebab terjadinya pemisahan antara pemilik (*prinsipal*) dan manajemen perusahaan (*agent*), umumnya didasarkan atas adanya tujuan/kepentingan yang berbeda antar masing-masing pihak. Menurut (Irmala,2010) penyebab terjadinya *conflict of interest* antara pihak pemilik dan manajemen karena disebabkan adanya ketidakpercayaan pemilik atas kinerja manajemen. Hal yang membuat pemilik tidak percaya terhadap manajemen contohnya seperti saat seorang manajer dengan sengaja merahasiakan informasi yang dimilikinya guna untuk keuntungan dirinya sendiri yang berakibat mengorbankan kepentingan pemilik. Hal tersebut bisa terjadi karena manajer memiliki informasi perusahaan yang tidak dimiliki pemilik (*asymmetry information*). Herawaty (2008) menjelaskan bahwa *asymmetry information* dapat terjadi karena manajer lebih mengetahui informasi perusahaan dibandingkan dengan pemilik atau pemegang saham, sehingga manajemen akan

berusaha memanipulasi kinerja perusahaan yang dilaporkan untuk kepentingannya sendiri.

Teori yang erat kaitannya mengenai konflik kepentingan antara pemilik (*prinsipal*) dengan manajemen perusahaan (*agent*) yaitu teori keagenan (*agency theory*). Madiastuty & Machfoedz (2003) dalam Ristie (2010) menurut teori keagenan, untuk mengatasi masalah ketidakselarasan kepentingan antara principal dan agent dapat dilakukan melalui pengelolaan perusahaan yang baik. Umumnya, teori keagenan digunakan untuk menganalisa hubungan antara pemilik dan karyawan, akan tetapi juga dapat digunakan untuk menganalisa konflik antar *class of prinsipal* Bradley (2009) dalam Dea (2010).

Berdasarkan penelitian sebelumnya, terdapat beberapa perbedaan hasil penelitian. Disebabkan tidak adanya konsistensi hasil penelitian sebelumnya, mendorong motivasi peneliti untuk menguji kembali mengenai *good corporate governance* dan struktur kepemilikan pada obyek yang berbeda dengan penelitian sebelumnya. Oleh karena itu peneliti akan melakukan penelitian mengenai **“ANALISIS PENGARUH MEKANISME GOOD CORPORATE GOVERNANCE DAN STRUKTUR KEPEMILIKAN TERHADAP KINERJA KEUANGAN BUMN SESUDAH PRIVATISASI”**

Kerangka Konseptual

Dewasa ini, konflik kepentingan (*conflic of interest*) antara pemilik (*prinsipal*) dengan manajemen (*agent*) semakin meningkat. Untuk mengatasi kesenjangan (*gap*) yang terjadi di antara pemilik dan manajemen, maka

seharusnya perusahaan tersebut melakukan fungsi tata kelola yang baik (*good corporate governance*).

Tuntutan adanya tata kelola yang baik (*good corporate governance*) di sebuah perusahaan khususnya di perusahaan milik negara/ Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menjadi sebuah keharusan. Hal ini didasarkan atas adanya tuntutan dari masyarakat agar pemerintah bersungguh-sungguh dalam memberantas KKN, sehingga terciptanya pemerintah yang bersih dan mampu menyediakan *public goods and services* (Sedarmayanti, 2003:2).

Dalam menerapkan konsep *good corporate governance* di BUMN, tidak lepas dari struktur kepemilikan di BUMN tersebut. Mayoritas struktur kepemilikan saham di BUMN dimiliki sebagian besar oleh pemerintah sisanya dipegang oleh institusional milik pemerintah sendiri. Hal ini dapat dilihat dari sampai Mei 2014 total BUMN Non Listed sebanyak 104 BUMN (Kementerian BUMN). Dengan BUMN yang masih belum listed, berakibat tidak adanya kepemilikan saham oleh publik maupun kepemilikan saham oleh asing, menyebabkan direktur BUMN hanya memiliki tanggungjawab kepada pemerintah. Padahal umumnya direktur BUMN adalah salah satu pemegang saham mayoritas (Indra dan Ivan, 2006:141). Hal tersebut menyebabkan kondisi BUMN tidak sehat, karena BUMN tersebut cenderung mencari keuntungan untuk segelintir pemegang saham mayoritas saja.

Untuk mengurangi kepemilikan saham oleh segelintir pemegang saham maka pemerintah gencar melakukan program privatisasi BUMN. Menurut E. S.

Savas dalam (Pandji,2008:68) menjelaskan bahwa privatisasi sebagai satu kunci menuju pemerintahan yang baik (*good governance*).

Populasi

Jenis penelitian ini adalah penelitian yang bersifat kuantitatif yang bertujuan untuk mengetahui ada/ tidak adanya pengaruh mekanisme *good corporate governance* dan struktur kepemilikan terhadap kinerja keuangan BUMN sebelum dan sesudah privatisasi.

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang melakukan *Initial Public Offering* (IPO) selama tahun 1991 hingga tahun 2013 yaitu sebanyak 20 perusahaan. Kementerian BUMN mengklasifikasi jenis BUMN menjadi 13 sektor, yaitu 1. Sektor Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, dan Daur Ulang, 2. Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan, 3. Sektor Perdagangan Besar dan Eceran, 4. Sektor Pertambangan dan Penggalian, 5. Sektor Industri Pengelolaan, 6. Sektor Jasa Profesional, Ilmiah, dan Teknis, 7. Sektor Pengadaan Gas, Uap, dan Udara Dingin, 8. Sektor Informasi dan Telekomunikasi, 9. Sektor transportasi dan Pergudangan, 10. Sektor Kontruksi, 11. Sektor Jasa Keuangan dan Asuransi, 12. Sektor Akomodasi dan Penyediaan Makanan dan Minuman, 13. Sektor Real Estate. Pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan *purposive sampling*, yaitu dengan menentukan kriteria khusus untuk pengambilan sampel. BUMN yang menjadi sampel antara lain PT Jasa Marga Tbk, PT Bank Tabungan Negara Tbk, PT Garuda Indonesia Tbk, dan PT Wijaya Karya Tbk.

Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan pada bab IV, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Dari hasil pengujian menunjukkan bahwa ukuran dewan komisaris berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan. Ini menunjukkan bahwa semakin besar ukuran dewan komisaris di sebuah perusahaan maka akan berkorelasi searah dengan peningkatan kinerja keuangan perusahaan. Hal ini mengidentifikasikan bahwa jika di sebuah perusahaan mempunyai ukuran dewan komisaris yang relatif besar, maka menyebabkan fungsi utama dari dewan komisaris yaitu fungsi pengawasan (*monitoring*) terhadap kebijakan yang diambil oleh direksi dapat berjalan dengan baik dan maksimal.
2. Dari hasil pengujian menunjukkan bahwa latar belakang pendidikan komisaris utama berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan. Ini menunjukkan bahwa semakin banyak komisaris utama yang memiliki latar belakang pendidikan bisnis di sebuah perusahaan maka akan berkorelasi searah dengan peningkatan kinerja keuangan perusahaan. Hal ini disebabkan karena komisaris utama yang memiliki latar belakang pendidikan bisnis akan lebih baik dalam mengelola perusahaan dibandingkan dengan komisaris utama yang tidak memiliki pendidikan bisnis serta komisaris yang berpendidikan tinggi akan memiliki jenjang karir lebih tinggi dan lebih cepat (Bray et. al 1995) dalam (Ganang,2011).
3. Dari hasil pengujian menunjukkan bahwa kualitas auditor berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan. Artinya bahwa kualitas Kantor

Akuntan Publik (KAP) yang dalam penelitian ini menggunakan proksi KAP big four yaitu KAP yang bekerjasama dengan KAP internasional menunjukkan tidak berkorelasi searah dengan kinerja keuangan. Hal ini kemungkinan besar terjadi karena terdapat faktor-faktor yang lebih mempengaruhi kualitas audit selain faktor ukuran KAP, faktor tersebut adalah kompetensi dan independensi (Chairunissa,2013).

4. Dari hasil pengujian menunjukkan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan. Artinya bahwa semakin kecil kepemilikan saham oleh institusional BUMN di sebuah perusahaan BUMN maka menyebabkan terjadinya peningkatan kinerja keuangan perusahaan. Hal ini terlihat dari nilai rata-rata *Net Profit Margin* yang diperoleh angka 10,70%. Dengan nilai rata-rata NPM yang menunjukkan angka 10,70% dapat dikatakan baik atau sehat karena nilai NPM tersebut lebih dari 5% (Raditya,2013). Hal ini menunjukkan bahwa program *privatisasi* yang dijalankan oleh pemerintah berhasil meningkatkan kinerja perusahaan dalam hal ini meningkatkan laba.

5.2 Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan, yaitu:

1. Mekanisme *good corporate governance* yang digunakan dalam penelitian ini masih terbatas pada tiga variabel yaitu ukuran dewan komisaris, latar belakang pendidikan komisaris utama, kualitas auditor.
2. Alat ukur (*proksi*) kepemilikan institusional hanya berfokus pada kepemilikan BUMN yang melakukan IPO

3. Periode pengamatan yang digunakan relatif pendek yaitu periode 2007 sampai dengan tahun 2011

5.3 Saran

Adapun saran yang dapat diberikan sebagai masukan untuk penelitian sejenis berikutnya yaitu:

1. Penelitian selanjutnya perlu mengidentifikasi mekanisme *good corporate governance* lain untuk mengetahui bagaimana pengaruhnya terhadap kinerja keuangan, seperti ukuran dewan direksi, direksi independen, komite audit, dll.
2. Alat ukur dalam kepemilikan institusional ditambah dengan kepemilikan institusional swasta maupun asing jika ada.
3. Diperpanjang periode tahun pengamatan serta menambah jumlah sampel yang akan dijadikan obyek penelitian.